

IMPLEMENTASI KONSEP KEAMANAN INSANI (*HUMAN SECURITY*) DI INDONESIA DALAM KONTEKS DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK

Oleh :

Rivaldo Noval Putra Santosa¹⁾, Arief Budiarto²⁾, Yulian Azhari³⁾

¹²³Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹Email: rivaldonoval@gmail.com

²Email: arief.budiarto@lecture.unjani.ac.id

³Email: azhariyulian6@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya masalah keamanan insani tidak identik dengan ancaman militer kemiliteran belaka saja. Tetapi ancaman insani ini dapat dimaknai sebagai suatu ancaman yang bertransformasi menjadi bentuk kelaparan dan kemiskinan yang berdampak pada munculnya kekerasan, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung. Di Indonesia saat ini, tren kekerasannya lebih cenderung kepada kekerasan langsung. Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab utama terjadinya konflik. Namun, bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik.

Kata kunci: kemanan insani, damai dan resolusi konflik

1. PENDAHULUAN

Perbedaan pandangan tentang keamanan manusia berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Intinya, ada perbedaan tajam mengenai apakah keamanan manusia dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam konflik bersenjata dan pelanggaran HAM ataukah lebih dari itu yang mencakup kerentanan dari semua bentuk ancaman, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam. Tampaknya perdebatan ini tidak akan berakhir, masing-masing mempunyai dasar argumen yang sangat kuat.

Ketika sebuah konsep atau gagasan harus ditransformasi ke dalam suatu kebijakan, maka aspek politik dan operasional harus menjadi variabel penting di dalamnya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disebut *the degree of human agency dan control*. Kebijakan keamanan manusia dengan demikian akan dilihat dalam konteks proses politik yang mengandung aspek human agency dan control yaitu pencegahan aksi kekerasan yang mungkin dilakukan oleh berbagai aktor terhadap manusia, mungkin negara, kelompok, individu, dan sebagainya. Masalah ini mengandung dua dimensi. Pertama, bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab politik terhadap keamanan individu secara luas. Kedua, perlu integrasi kebijakan keamanan yang harus dirancang secara integratif antar sektor. Penyusunan dan pengembangan Indeks Keamanan Manusia Indonesia merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesia-an, yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan. Dengan demikian, dalam konteks damai dan resolusi konflik. Dimensi

yang berkaitan erat adalah terkait keamanan dan kekerasan.

Dengan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk setiap interaksi di dalam masyarakat memiliki potensi untuk terjadi friksi dan konflik, baik sesama anggota kelompok masyarakat, maupun antarkelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan kelompok di Indonesia yang disebabkan oleh kebencian, ketakutan dengan kombinasi persaingan sosial, ekonomi, dan politik menciptakan potensi konflik sosial baru yang makin mengkhawatirkan keselamatan individu, masyarakat, dan persatuan Indonesia. Berbagai kejadian konflik komunal dan struktural yang terjadi di Indonesia, merupakan ancaman bagi manusia, kelompok masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun dalam konteks Keamanan Manusia di Indonesia, dimensi kekerasan merujuk pada kekerasan langsung, yaitu penggunaan kekerasan secara langsung pada manusia yang menyebabkan korban baik luka, cacat maupun hilangnya nyawa. Penggunaan konsep kekerasan langsung dalam dimensi kekerasan terkait keamanan manusia didasarkan pada argumen Schnabel, bahwa kekerasan langsung (*direct violence*) adalah katalis terhadap ketidakamanan manusia. Definisi kekerasan langsung adalah *avoidable impairment of fundamental human needs or life which makes it impossible or difficult for people to meet their needs or achieve their full potential. Threat to use force is also recognised as violence. Direct violence can take many forms. In its classic form, it involves the use of physical force, like killing or torture, rape and sexual assault, and beatings.*

Dalam "Segitiga Kekerasan" milik Johan Galtung juga dijelaskan bahwa perbedaan kekerasan langsung dengan kekerasan tidak langsung (kultural

dan struktural) salah satunya adalah aspek terlihat dan tidak terlihat. Galtung menyatakan, “*The visible effects of direct violence are known: the killed, the wounded, the displaced, the material damage, all increasingly hitting the civilians. But the invisible effects may be even more vicious: direct violence reinforces structural and cultural violence*”.



Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung

Selain menggunakan teori kekerasan Galtung, kekerasan langsung atau personal/fisik juga mengacu pada beberapa dimensi keamanan dalam keamanan manusia versi UNDP seperti keamanan personal yang bertujuan untuk melindungi manusia dari kekerasan fisik, baik berasal dari negara atau dari ancaman eksternal, baik individu atau aktor subnegara, dari kekerasan dalam rumah tangga, hingga predator, keamanan komunitas, yaitu keamanan terhadap penindasan dari kelompok lain, dan keamanan politik, yaitu keamanan dari represi negara, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian termasuk dalam penelitian eksploratif yaitu dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan yang awalnya peneliti hanya memahami permasalahan yang ada secara umum, baru kemudian peneliti melakukan penelitian. Penelitian eksploratif memiliki masalah yang belum pernah dijejaki, dan berusaha menemukan atau mengungkap permasalahan yang sedang dibutuhkan atau akan diteliti tersebut (Bungin, 2011). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka/literatur yaitu peneliti menelaah secara tekun akan kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian (Nazir, 2014)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keamanan Insani (*Human Security*) di Indonesia dalam Konteks Damai dan Resolusi Konflik

Masalah keamanan dan ketidakamanan tidak identik dengan ancaman fisik ataupun kemiliteran

belaka. Paul Hoffman (2004) menyebutkan bahwa bagi ratusan juta penduduk dunia saat ini, salah satu sebab timbulnya ketidakamanan (*insecurity*) hidup mereka adalah bukan semata-mata terorisme, namun kemiskinan berlebihan (*extreme poverty*). Saat ini, lebih dari satu milyar penduduk bumi (dari total enam milyar) hidup hanya dengan pendapatan setara satu dollar per hari. Penelitian dari *Peace Research Institute (PRIO)* Oslo dan *Uppsala Conflict Data Program* (2002) menyebutkan bahwa perang sipil (*civil wars*) ataupun konflik internal (*internal conflict*) di suatu negara menyebabkan kematian lebih banyak dari pada konflik bersenjata antara negara (*armed forces*) dengan pemberontak ataupun gerakan separatis. Berbanding 1000 kematian per tahun untuk perang sipil dengan 25 kematian per tahun untuk konflik vertikal antara negara dengan pemberontak ataupun gerakan separatis. Di antara sebab tidak langsung terjadinya perang sipil adalah kemiskinan, kelaparan, ketimpangan distribusi pendapatan, maupun pemindahan paksa (*forced displacement*).

Toms dan Ron (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan nasional berpengaruh sebagai sebab terjadinya konflik. Data statistik menyebutkan konflik berpotensi lahir di negara dengan *Gross Domestic Bruto* (GDP) per kapita rendah. Logika dari asumsi ini adalah bahwa negara miskin kurang memiliki angkatan bersenjata yang efisien dan taat hukum. Angkatan bersenjata malah seringkali memerangi gerakan oposisi. Negara miskin juga cenderung lemah dalam pelayanan sosial namun sebaliknya memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Menyebabkan lahirnya diskriminasi dan ketidaksetaraan (*inequality*) antar rakyat.

Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab utama terjadinya konflik. Sedikit sekali penelitian ilmiah yang membuktikan korelasi antara keduanya. Namun, bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik, tak diragukan lagi. Penelitian PRIO Oslo dan Uppsala (2002) menghadirkan relasi yang jelas antara kemakmuran nasional dengan perdamaian. Hanya satu dari tiga puluh negara terkaya di dunia yang mengalami konflik. Sebaliknya, pada saat yang sama tujuh belas dari tiga puluh satu negara termiskin mengalami konflik.

Asumsi ini dapat membantu menjelaskan sebab terjadinya konflik di Indonesia. Sebagian besar konflik yang terjadi sepuluh tahun terakhir (1998-2008) di Indonesia adalah bukan konflik bersenjata antara negara (TNI/POLRI) dengan gerakan separatis, namun lebih bersifat konflik internal ataupun perang sipil antar pihak dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Poso-Sulteng, Maluku, Sambas-Kalbar, Sampit-Kalteng, dan Sanggau Ledo-Kalbar dalam kurun waktu 1998-2003. Di antara penyebab konflik sipil di tempat-tempat tersebut adalah tidak semata-mata perseteruan etnis ataupun agama belaka. Namun

bercampur dengan kepentingan politik, kemiskinan dan rendahnya pendidikan, serta ketidakpuasan dalam hal distribusi pendapatan. Frances Stewart (2005) menyebutkan: *"although every situation is unique, there are some predisposing cultural, political and economic condition that are conducive to conflict."*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang ada di dalam pembahasan, adapun kesimpulannya yakni pada dasarnya masalah keamanan insani tidak identik dengan ancaman militer kemiliteran belaka saja. Tetapi ancaman insani ini dapat dimaknai sebagai suatu ancaman yang bertransformasi menjadi bentuk kelaparan dan kemiskinan yang berdampak pada munculnya kekerasan, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung. Di Indonesia saat ini, tren kekerasannya lebih cenderung kepada kekerasan langsung. Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab utama terjadinya konflik. Namun, bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik. Hal ini sejalan dengan penelitian dari PRIO Oslo dan Uppsala (2002) menghadirkan relasi yang jelas antara kemakmuran nasional dengan perdamaian.

5. REFERENSI

Albrecht Schnabel. 2007. *The Human Security Approach To Direct And Structural Violence, Security and Conflict*. SIPRI

- Allenby, Braden R. "Environmental Security: Concept and Implementation". *Journal International Political Science Review*, Vol. 21, No. 1, 2000.
- Galtung, Johan. 2004. *Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence*. Polylog: Forum for Intercultural Philosophy.
- Human Security Unit, *Human Security In Theory And Practice, An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, New York: United Nations, 2009.
- Indonesia Investment, *Kemiskinan di Indonesia*, <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses pada 10 Agustus 2021.
- Jones, J. F. "Human Security and Social Development". *Journal of International Law and Policy*, Vol. 33.
- Tadjoeddi, Mohammad Zulfan. 2002. *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Kontekstransi: Kasus Indonesia 1990- 2001*. Working Paper 0201, United Nations Support Facility for Indonesian Recovery, Jakarta.
- Thomas, Caroline. 2000. *Global Governance and Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality*. Virginia: Pluto Press.
- UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: United Nations Development Programme